

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hamsinar¹

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oct 25, 2022

Revised Nov 10, 2022

Accepted Nov 20, 2022

Kata Kunci:

Akuntabilitas
Kebijakan Publik
Partisipasi Masyarakat
Sistem Pengendalian Intern
Tranparansi

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

Metodologi:Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis regresi linear berganda dengan uji nilai selisih mutlak untuk hipotesis partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian.

Temuan Utama: Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderasi transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbaruan/Keaslian dari Penelitian: Keterbaruan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki peran moderating yang berbeda terhadap variabel-variabel tersebut.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



Corresponding Author:

Hamsinar,
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar,
Indonesia
Email: hamsinarn1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan[1]. Dengan bergulirnya UU No.22/1999 yang diperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 yang diperbaharui dengan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia[2]. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[3].

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapi tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal tersebut ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan. pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi–aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat[4]. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Badan pemeriksa keuangan menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada dewan perwakilan rakyat daerah setahun sekali atau diakhir masa jabatannya. Namun dalam prakteknya, implementasi standar akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses penggunaannya. Peraturan tentang sistem pengendalian intern bagi pemerintahan pusat/daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian Daniel & Yohanes (2013) menyebutkan dengan terciptanya penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga berimplikasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintahan daerah di Indonesia untuk berbondong-bondong membangun daerahnya masing-masing, termasuk Sulawesi Selatan (Makassar) yang telah membangun kotanya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki unit perwakilan dari

BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusun kebijakan yang terkait, di Sulawesi Selatan memiliki beberapa kabupaten seperti, Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Enrekang, Sidrap, Takalar, Jennepono, Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Selayar, palopo, Luwu, dan Tanah Toraja. Pembangunan di wilayah masing-masing telah dilakukan termasuk kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang masih perlu dianalisis. jenis penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Daerah penelitian dilakukan di pemerintahan kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian korelasional (Correlational Research) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih yaitu penelitian studi kasus dan lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pinrang. penelitian merupakan penelitian populasi (sensus), artinya keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian (total sampling). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel pengaruh partisipasi masyarakat (X1), akuntabilitas (X2), transparansi kebijakan publik (X3) dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel moderasi (M) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji prasyarat dan uji hipotesis, dimana uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, dan uji multikolinearitas. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Deskriptif Variabel

Deskriptif variabel dari 70 responden Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dengan menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Partisipasi masyarakat	70	31,00	40,00	35,71	2,62
Akuntabilitas	70	38,00	54,00	44,80	5,55
Transparansi kebijakan publik	70	26,00	35,00	29,81	2,25
Sistem pengendalian internal	70	87,00	129,00	109,18	17,06
Kualitas laporan keuangan	70	65,00	97,00	83,48	9,39

Tabel statistik deskriptif variabel diatas menunjukkan bahwa range yang digunakan adalah skala likert 1-5 dimana nilai angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai rata-rata 35,71. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 31,00 dan nilai maximum adalah 40,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,62, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel akuntabilitas mempunyai nilai rata-rata 44,80. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 38,00 dan nilai maximum adalah 54,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 5,55, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel transparansi kebijakan publik mempunyai nilai rata-rata 29,81. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi kebijakan publik yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 26,00 dan nilai maximum adalah 35,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,25, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel sistem pengendalian intern mempunyai nilai rata-rata 109,18. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 87,00 dan nilai maximum adalah 129,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 17,06, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai rata-rata 83,48. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 65,00 dan nilai maximum adalah 97,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 9,39, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel Sistem pengendalian intern yakni 109,18, sedangkan yang terendah adalah variabel Transparansi kebijakan publik yaitu 29,81. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel sistem pengendalian intern yaitu 17,06 dan yang terendah adalah variabel transparansi kebijakan publik yaitu 2,25.

3.2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$.

Table 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std Deviation	6,19539131
	Absolute	0,96
Most Extreme Differences	Positive	0,96
	Negative	-,057
Kolmogorov-Smirnov Z		,806
Asymp. Sig.(2-tailed)		,534

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-smirnov. Dari Tabel 2 dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,534, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

3.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Multikolonearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu cara untuk menguji adanya multikoloniaritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Table 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Partisipasi masyarakat	0,373	2,683
Akuntabilitas	0,871	1,148
Transparansi kebijakan publik	0,79	1,266
Sistem pengendalian intern	0,388	2,58

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

3.4. Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan keuangan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Table 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,752 ^a	,565	,538	6,38317

a. Predictors: (Constant), Sistem pengendalian intern, akuntabilitas, tranparansi kebijakan publik, partisipasi masyarakat

b. Dependent variable: Kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel diatas nilai R adalah 0,752 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,80 - 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik berpengaruh sangat kuat terhadap Kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R2 (Adjusted R Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat (dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,538, hal ini berarti bahwa 53,8% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian intern. Sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian intern sebesar 46,2%. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan karena adanya aspirasi masyarakat akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip good governance, sehingga semakin transparan laporan keuangan maka semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang.

Pemerintah kabupaten Pinrang sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan mewujudkan *good governance*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh [5], akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agent mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil- wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, sehingga masyarakat/agent mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah[6]. Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan Sistem Pengendalian Intern yang baik maka suatu organisasi

akan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, Transparansi kebijakan publik, dan sistem Pengendalian Intern secara simultan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

Keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Keterlibatan tersebut memberikan pengaruh positif yang signifikan yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. Di sisi lain, sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berkonotasi bahwa sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, efektivitas akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dapat ditingkatkan melalui sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem pengendalian internal yang baik mencakup aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Demikian pula, akuntabilitas melibatkan akuntabilitas manajemen keuangan, penilaian kinerja keuangan, sistem informasi yang andal, dan akuntabilitas kinerja keuangan yang objektif, yang dapat dievaluasi secara independen. Konsekuensinya, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pemerintah dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, sistem pengendalian intern dapat mendukung dampak transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Kerja sama antara transparansi kebijakan publik dan sistem pengendalian internal merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, mempermudah akses informasi laporan keuangan.

REFERENSI

- [1] E. Sari Zayadi, "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)." Universitas Komputer Indonesia, 2010.
- [2] R. A. Anisa, "Pelaksanaan Good Governance Pada Pemerintahan Nagari (Studi Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Nagari Simarasok Kabupaten Agam)." Universitas Andalas, 2013.
- [3] J. Pramono, "Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta)," *Among Makarti*, vol. 7, no. 1, pp. 83–112, 2014, doi: <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>.
- [4] L. Patu, "Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara," *Katalogis*, vol. 4, no. 2, 2016.
- [5] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976.
- [6] A. Adrianti, S. Sumarlin, and P. H. Anwar, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa," *Income J. Accounting, Manag. Econ. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–44, 2023.